



RENCANA STRATEGIS

KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2016-2021



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Dokumen RENSTRA ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun tujuan utama dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan secara kronologis dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2016 - 2021.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyelesaian dokumen ini.

Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Tenggarong, September 2016

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. Armeinadi.H

NIP. 19590512 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 Bab 1. PENDAHULUAN	 1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Landasan Hukum	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan	1-4
1.4. Sistematika Penulisan	1-5
 Bab 2. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	 2-1
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	2-1
2.2. Struktur Organisasi	2-2
2.3. Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan	2-6
2.4. Potensi Kelautan dan Perikanan	2-9
2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	2-14
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	2-21
 Bab 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	 3-1
3.1. Identifikasi Permasalahan	3-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3-3
3.3. Telaahan Renstra KKP dan Renstra DKP Provinsi Kalimantan Timur	3-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	3-7
3.5. Lingkungan Strategis	3-8
 Bab 4. TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN	 4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan	4-1
4.2. Strategi dan Kebijakan	4-4
 Bab 5. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	 5-1
 Bab 6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	 6-1

DAFTAR TABEL

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	2-6
2	Daftar Jabatan Struktural di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	2-7
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	2-7
4	Data Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Umum	2-7
5	Jenis Aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	
6	Luas Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	2-11
7	Luas Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Kecamatan	2-13
8	Panjang Garis Pantai Menurut Kecamatan	2-13
9	Produksi (Ton) dan Nilai Produksi (Rp 000) Perikanan Laut dan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	2-20
10	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	2-15
11	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Perairan Laut Menurut Kecamatan Tahun 2015	2-21
12	Jumlah Alat Tangkap Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014	2-22
13	Jumlah Armada Penangkapan Ikan Perairan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	2-22
14	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	2-23
15	Luas Area Usaha, Produksi serta Nilai Produksi Budidaya Tambak Menurut Kecamatan	2-27
16	Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Tambak Menurut Jenis Komoditi	2-28
17	Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 – 2015	2-30
18	Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Komoditas	3-8
19	Analisis SWOT untuk Penyusunan Renstra DKP Kabupaten Kukar	3-14
20	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	4-1
21	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kukar Tahun 2016 – 2021.....	4-3
22	Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kelautan dan Perikanan	

	Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	5-2
23	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021	5-6
24	Indikator Kinerja Program dan Sasaran Menurut RPJMD Kabupaten Kukar 2016-2021	6-3
25	Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.....	6-6

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kukar	2-3
2	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Kutai Kartanegara	2-16
3	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	2-17
4	Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	2-18
5	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Umum) di Kabupaten Kukar Tahun 2015	2-21
6	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Kukar Tahun 2015	2-24
7	Produksi Perikanan Karamba di Kabupaten Kukar Tahun 2015	2-25
8	Produksi Perikanan Kolam di Kabupaten Kukar Tahun 2015	2-25
9	Perkembangan Produksi Tambak di Kabupaten Kukar 2010-2014.....	2-27

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara prinsip direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan kelautan dan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsif dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan

memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada.

Dalam periode pelaksanaan Renstra, terjadi berbagai dinamika, seperti adanya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merubah beberapa urusan kewenangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga dilakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menyesuaikan dengan adanya perubahan Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian. Disamping Hal itu, perubahan RENSTRA juga didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan periode awal RENSTRA.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- k. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- m. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- o. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008;
- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- s. Peraturann Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
- z. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 050/1959/BAPPEDA Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 adalah untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra ini adalah :

- a. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan secara kronologis dan berkelanjutan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017-2021.
- b. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah bidang kelautan dan perikanan.
- c. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- e. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
- f. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Kepala Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang PerubahanRPJMD.
- g. Memastikan terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.
- h. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra Perubahanhingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2. Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra KKP dan Renstra DKP Provinsi Kalimantan Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB VIII. PENUTUP

2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor **13 Tahun 2008** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pasal 40 dan 41 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan budidaya;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan tangkap;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelautan, pesisir pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya ikan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Struktur Organisasi

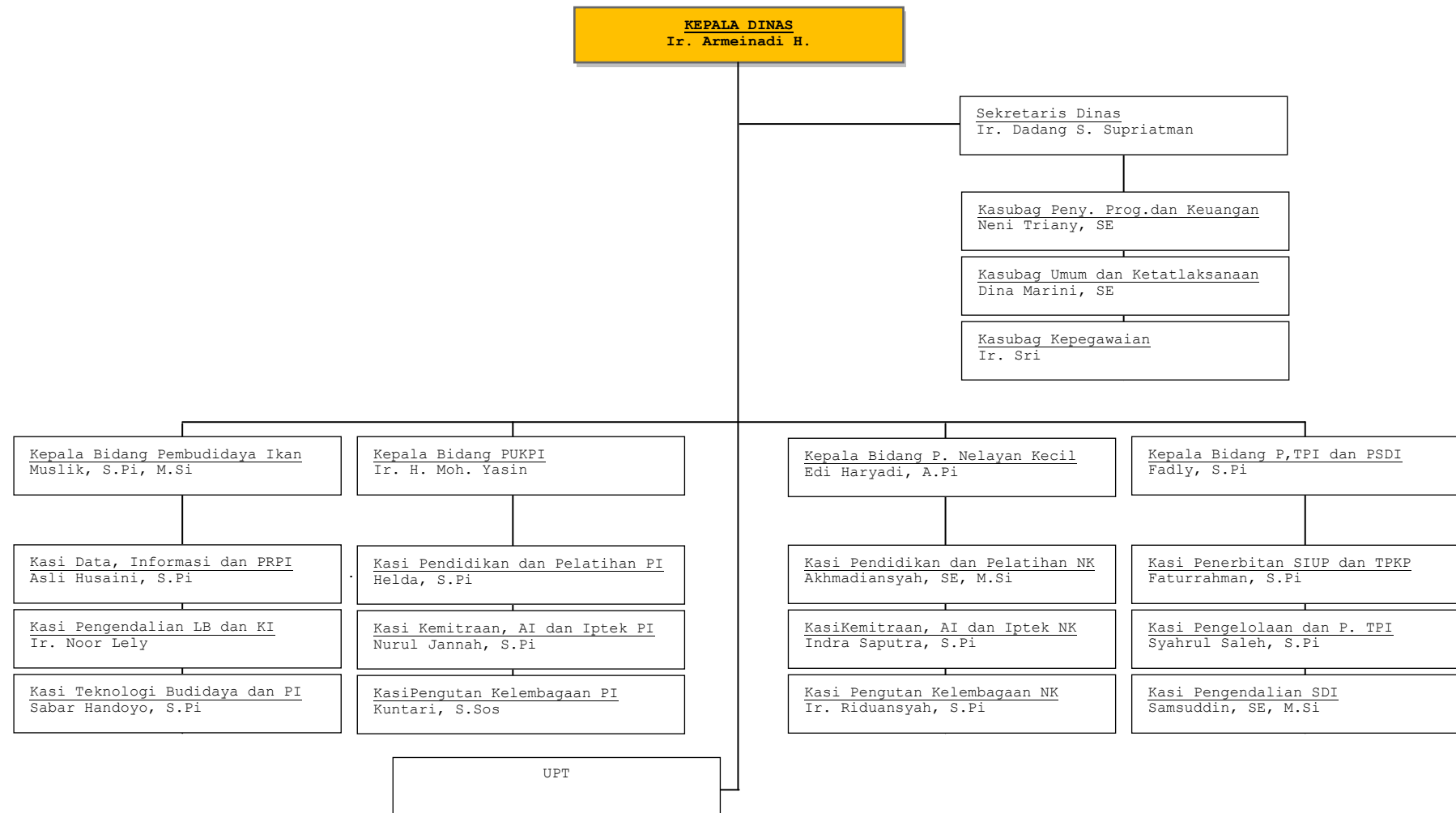
Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Perda Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 42 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- d. Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan, membawahkan :

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

- 1) Seksi Data, Informasi dan Penataan Ruang Pembudidaya Ikan;
 - 2) Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan;
 - 3) Seksi Teknologi Budidaya Pembenihan Ikan.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan, membawahkan :
- 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Pembudidaya Ikan;
 - 2) Seksi Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Pembudidaya Ikan;
 - 3) Seksi Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan
- f. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahkan :
- 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil;
 - 2) Seksi Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Nelayan Kecil;
 - 3) Seksi Pengutan Kelembagaan Nelayan Kecil.
- g. Bidang Perijinan, TPI dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, membawahkan :
- 1) Seksi Penerbitan SIUP dan TPKP;
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Penyeleggaraan TPI;
 - 3) Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kukar.

Tugas pokok masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas.

b. Sekretaris

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, sebagai berikut :

- Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan Data, Informasi dan Penataan Ruang Pembudidaya Ikan, Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan, Teknologi Budidaya Pembenihan Ikan. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- Seksi Teknologi Budidaya Pembenihan Ikan;
- Seksi Data, Informasi dan Penataan Ruang Pembudidaya Ikan;
- Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan ;

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pembudidaya Ikan, Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Pembudidaya Ikan, Penguatan Kelembagaan Pemb. Ikan. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- Seksi Pendidikan dan Pelatihan Pembudidaya Ikan
- Seksi Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Pembudidaya Ikan
- Seksi Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan

e. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil, Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Nelayan Kecil, Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh :

- Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil
- Seksi Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Nelayan Kecil
- Seksi Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil

2 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

f. Bidang Perijinan, TPI dan Pengendalian Sumber Daya Ikan

Kepala Bidang Perijinan, TPI dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan Penerbitan SIUP dan TPKP, Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, Pengendalian Sumber Daya Ikan. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dibantu oleh :

- Seksi Penerbitan SIUP dan TPKP
- Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan.

2.2. Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan berkembangnya organisasi dan beban tugas yang terus meningkat, Jumlah sumberdaya manusia yang ada saat ini dirasakan masih terbatas, terutama sumberdaya manusia di kecamatan. Jumlah personil secara keseluruhan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai Desember 2014 sebanyak 122 orang dengan perincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten sebanyak 62 orang sedangkan PNS di kecamatan sebanyak 60 orang. Pendistribusian PNS menurut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1. Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

No	Pangkat dan Golongan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	S M A	S M P	SD	
1	Pembina Muda Utama Gol. IV / c	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Tk.I Gol. IV / b	-	4	-	-	-	-	4
3	Pembina Gol. IV / a	2	2	-	-	-	-	4
4	Penata Tk.I Gol. III/d	1	15	-	-	-	-	16
5	Penata Gol. III/c	-	8	-	1	-	-	9
6	Penata Muda Tk.I Gol. III/b	-	30	-	4	-	-	34
7	Penata Muda Gol. III/a	-	4	1	3	-	-	8
8	Pengatur Tk.I Gol. II/d	-	-	2	6	-	-	8
9	Pengatur Gol. II/c	-	-	-	1	-	-	1
10	Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b	-	3	-	31	-	-	34
11	Pengatur Muda Gol. II/a	-	-	-	1	-	-	1
12	Juru Tk.I Gol. I/d	-	-	-	-	2	1	3
13	Juru Gol. I/c	-	-	-	-	-	-	0
14	Juru Muda Tk.I Gol. I/b	-	-	-	-	-	2	2
15	Juru Muda Gol. I/a	-	-	-	-	-	-	0

2 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Pangkat dan Golongan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	S M A	S M P	SD	
	J U M L A H	3	66	3	47	2	3	124

Tabel 2.2. Daftar Jabatan Struktural di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Lokasi	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Dinas Kabupaten	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
		Kepala Bidang	4
		Kepala Seksi	12
		Kasubag	3
		Jumlah	21

Tabel 2.3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

No	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Kepala UPTD	Kepala TU UPTD	Jumlah
1.	UPTD Budidaya Air Payau.	1	1	2
2.	UPTD Budidaya Air Tawar	1	1	2
3.	UPTD Satellite Station Bumi	1	1	2
4.	UPTD TPI Semangko'	1	1	2
5.	UPTD Balai Benih Ikan	1	1	2
6.	UPTD Reservat	-	1	1

Tabel 2.4. Data Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Umum

No	Jabatan Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	49
	- Eselon II	1
	- Eselon III	7
	- Eselon IV	26
2.	Jabatan Fungsional	75

Aset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 6 jenis utama meliputi: (1) Tanah dan bangunan; (2) Kendaraan bermotor; (3) Peralatan kantor; (4) Peralatan mesin; (5) Peralatan ukur dan (7) Meubelair.

Adapun jenis jenis, jumlah dan satuan, tahun perolehan serta kondisi aset disajikan pada Tabel 2.5. berikut ini.

2 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.5. Jenis Aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Jenis Aset	Jumlah Aset	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Aset
1.	TANAH DAN BANGUNAN				
1.1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.967	M ²	2005	Baik, berada pada 3 Lokasi
1.2.	Tanah			2008	Baik
1.3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Perikanan, Kantor UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Satelite Station Bumi, Kantor Reservat, TPI)	12	Unit	2005-2013	Baik
1.4.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2	Unit	2005	Baik
1.5.	Rumah Negara	1	Unit	2005	Baik
1.6.	Pos Pengawasan	5	Unit	2015-2014	Baik
2.	KENDARAAN BERMOTOR				
2.1.	Kendaraan Roda 4 (Station Wagon)	7	Unit	2007	Baik
		4	Unit	2008	Baik
2.2.	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	2	Unit	2008	Baik
2.3.	Sepeda Motor	4	Unit	2006	Baik
		7	Unit	2007	Baik
		33	Unit	2008	Baik
		2	Unit	2010	Baik
		4	Unit	2011	Baik
		5	Unit	2013	Baik
2.4.	Kapal Motor	12	Unit	2008	Baik
		6	Unit	2009	Baik
2.5.	Speed Boat	2	Unit	2007	Baik
2.6.	Alat Pengolahan		Unit		Baik
2.7.	Motor Boat	5	Unit	2007	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		1	Unit	2012	Baik
		4	Unit	2013	Baik
2.8	Kapal Penangkap Ikan	2	Unit	2009	Baik
		2	Unit	2010	Baik
3.	PERALATAN KANTOR				Baik
3.1.	Laptop	2	Unit	2006	Baik
		5	Unit	2009	2 Unit Rusak Berat
		4		2011	
3.2.	Note Book	15	Unit	2007	2 Unit Rusak Berat
		29	Unit	2008	4 Unit Rusak Berat
		1	Unit	2009	
		35	Unit	2010	
		3	Unit	2013	Baik
3.3.	Personal Komputer	1	Unit	2005	Baik
		1	Unit	2006	Baik
		7	Unit	2007	Rusak Berat
		14	Unit	2008	Rusak Berat
		4	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2014	Baik
3.4.	Printer	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		29	Unit	2008	Rusak Berat

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Jenis Aset	Jumlah Aset	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Aset
		2	Unit	2009	Rusak Berat
		11	Unit	2010	Baik
		13	Unit	2011	6 Unit Rusak Berat
		10	Unit	2013	Baik
		11	Unit	2014	Baik
3.5.	Scanner	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2008	Rusak Berat
3.6.	GPS	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
3.7.	Proyektor / Infocus	1	Unit	2008	Rusak Berat
		1	Unit	2009	Baik
		1	Unit	2014	Baik
3.8.	Faximile	2	Unit	2006	Baik
3.9.	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	2008	Baik
		2	Unit	2012	Baik
3.10.	Mesin Ketik	1	Unit	2007	Baik
		4	Unit	2010	Baik
		4	Unit	2011	Baik
3.11.	Mesin Ketik Listrik	1	Unit	2008	Baik
		4	Unit	2012	Baik
		17	Unit	2013	Baik
3.12.	Peralatan Studio Visual	1	Unit	2005	Baik
		2	Unit	2010	1 Unit Rusak Berat
3.13.	Kamera	1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2009	Baik
		8	Unit	2010	Baik
		19	Unit	2013	Baik
3.14.	Handy Cam	1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2010	Baik
3.15.	UPS	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2009	Baik
		4	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		2	Unit	2014	Baik
3.16.	Telephone	11	Unit	2008	Baik
3.17.	Air Condisioner (AC)	1	Unit	2009	Baik
		5	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		2	Unit		Baik
3.18.	Kipas Angin	3	Unit	2009	Rusak Berat
		1	Unit	2010	Baik
3.19.	Mesin Absensi	1	Unit	2013	Baik
		1	Unit	2014	Baik
4.	PERALATAN MESIN				
4.1.	Alat Panen / Pengolahan Lain-Lian	1	Unit	2005	Baik
4.2.	Compresor Pengisi Tabung Selam	1	Unit	2010	Baik
4.3.	Genset	2	Unit	2010	Baik
			Unit		Baik
			Unit		Baik
4.4.	Mesin Pembuat Pakan	1	Unit	2010	Baik
4.5.	Mesin Pemotong Rumput	2	Unit	2010	Baik
5.	PERALATAN UKUR				

2 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Jenis Aset	Jumlah Aset	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Aset
5.1.	Alat Ukur Kualitas Air	1	Unit	2009	Baik
5.2.	Fish Finder	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2010	Baik
		8	Unit	2009	Baik
5.3.	Alat Selam	1	Unit	2009	Baik
			Unit		Baik
5.4.	Alat Pemadam	2	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2013	Baik
6.	MEUBELAIR				
6.1.	Filling Besi - Kayu	1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2012	Baik
		2	Unit	2014	Baik
6.2.	Lemari Kayu	1	Unit	2008	Baik
6.3.	Lemari Arsip	17	Unit	2013	Baik
6.4.	Meja Kerja	20	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		12	Unit	2012	Baik
		42	Unit	2013	Baik
6.5.	Meja Rapat	1	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2011	Baik
6.6.	Kursi Rapat	4	Unit	2010	Baik
		25	Unit	2011	Baik
6.7.	Kursi Kerja	2	Unit	2011	Baik
		57	Unit	2012	Baik
		14	Unit	2013	Baik
6.8.	Kursi Tamu	10	Unit	2009	Baik
		11	Unit	2013	Baik
6.9.	Kursi Lipat	50	Unit	2009	Baik
		6	Unit	2010	Baik
6.10.	Bangku Tunggu	2	Unit	2010	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya diukur menurut indikator-indikator data yang dapat dihitung terdiri dari predikat penilaian kinerja organisasi, produksi kelautan dan perikanan, PDRB sector kelautan dan perikanan, indeks nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan, jumlah tenaga kerja sector kelautan dan perikanan, tingkat konsumsi ikan perkapita, jumlah ekspor, jumlah kawasan konservasi dikelola secara berkelanjutan dan jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam pengawasan. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan dalam table T.C-23.

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T.C-23 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Predikat Penilaian Kinerja Organisasi				-	-	-	75	80	-	-	-	74,04	...	-	-	-	98,7%	...
	Jumlah Produksi Kelautan dan Perikanan				126.760 Ton	133.760 Ton	140.504 Ton	148.897 Ton	164.533 Ton	123.506 Ton	134.373,6 Ton	141.683 Ton	151.958,9 Ton	158.632,8 Ton	97,4%	100,7%	100,1%	102%	96,4%
	PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan							3%	3,5%	-	-	-	3%	4,5%	-	-	-	100%	128,5%
	Indeks Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan.				104	106	108	101	102	96,1	101	98,02	105,8	102	92,4%	95,2%	90,7%	100,7%	100%

Jumlah Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan				90.000 Orang	92.000 Orang	94.000 Orang	-	-	89.500 Orang	92.000 Orang	92.750 Orang	-	-	99,4%	100%	98,7%	-	-
Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat				73/Kapita	74,5/Kapita	75,5/Kapita	74/Kapita	74,5/Kapita	72,8/Kapita	74/Kapita	74/Kapita	74,1/Kapita	74,4/Kapita	99,7%	99,3%	96,7%	100,1%	99,8%
Jumlah Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan				4.977 Ton	5.097 Ton	5.199 Ton	\$29,305,393	\$29,891,500	1.809 Ton	1.799 Ton	1.673 Ton	\$28,730,000	\$30,160,873	36,2%	35,5%	32,2%	98,0%	100,9%
Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan				3	3	3	1	1	3	3	3	1	2	100%	100%	100%	100%	200%
Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS WAS) Yg Aktif Dalam Pengawasan				5	14	10	-	-	5	14	10	-	-	100%	100%	10%	-	-

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil. Hal ini tercermin dari capaian terhadap target indicator pelayanan itu sendiri.

Indikator Produksi perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan. *Data time series* menunjukkan bahwa tingkat produksi perikanan pada tahun 2013 tercatat sebesar 123.506 ton mendekati target sebesar 126.760 Ton dengan rasio capaian sebesar 97,4%. Produksi perikanan tahun 2013 tersebut meningkat menjadi 158.632,8ton pada tahun 2017 dengan rasio capaian sebesar 99,3% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,6%.

Capaian yang diraih tersebut tidak terlepas dari adanya sinergitas seluruh stake holder yang ada antara pemerintah, masyarakat dan pihak perusahaan. Penekanan pada aspek peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM Nelayan dan Pembudidaya ikan menjadi salah satu kunci dari pencapaian tersebut. Disamping aspek SDM, aspek perencanaan yang berjalan dengan baik juga turut mempengaruhi keberhasilan tersebut. Faktor lain yang juga turut memberi andil dalam pencapaian tersebut adalah berjalannya aktifitas usaha (budidaya maupun penangkapan ikan) tanpa permasalahan yang serius, misalnya tidak terdapat serangan hama dan penyakit yang masif pada usaha budidaya, tidak terjadinya masa paceklik berkepanjangan normal bagi nelayan.

Capaian tersebut sangat menggembirakan, namun tetap menyisakan persoalan yang harus diatasi bersama yakni masih terdapat 3 indikator yang pencapaiannya perlu ditingkatkan yaitu predikat penilaian organisasi dan ekspor produk kelautan dan perikanan. Predikat penilaian kinerja organisasi belum mampu mencapai kinerja 100% dari target yang ditentukan. Permasalahan utama yang menjadi point krusialnya adalah ketersediaan dan keteraturan dalam penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan, terutama dokumen-dokumen yang terkait dengan kinerja organisasi.

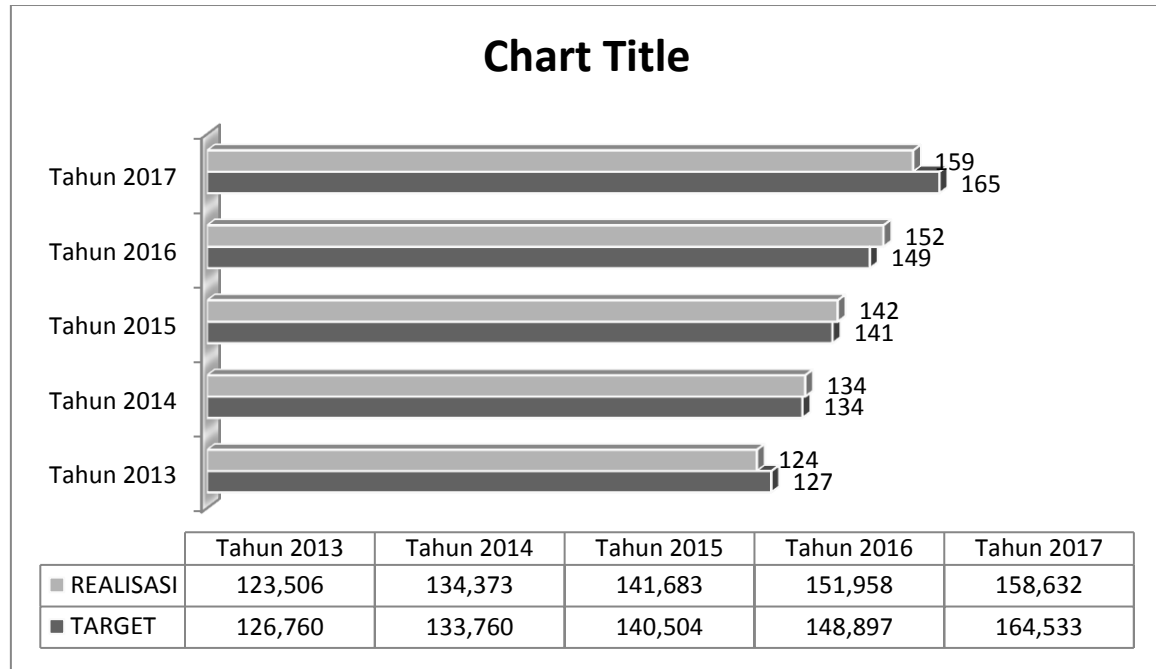
Kinerja ekspor yang tidak maksimal lebih disebabkan oleh adanya situasi nasional yang kurang menguntungkan, dimana produksi udang windu sebagai bahan baku utama ekspor dimaksud secara nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan. Permasalahan tersebut berdampak terhadap kinerja ekspor perikanan kukar, karena produksi udang windu di Kab. Kutai Kartanegara sebagian dijual dalam bentuk raw material ke luar dari wilayah Kutai Kartanegara (Makasar dan Surabaya). Hal tersebut kemungkinan akan terjadi dalam beberapa tahun kedepan jika kondisi produksi budidaya udang windu secara nasional tidak mengalami perbaikan, walaupun produksi udang windu di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap stabil.

Capaian tenaga kerja pada sektor kelautan dan perikanan juga belum optimal. Persoalan ini lebih kepada kurangnya minat masyarakat dalam hal ini pemuda untuk menggeluti usaha budidaya ikan maupun nelayan. Profesi budidaya ikan maupun nelayan masih dianggap profesi kelas dua, sehingga sebagian besar masyarakat mau menggeluti profesi tersebut karena "Terpaksa", Misalnya karena di PHK diperusahaan, tidak memiliki ijazah untuk melamar pekerjaan.

2 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Selengkapnya mengenai produksi perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3. Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 - 2017.



Sumber : Laporan Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (2017)

Kinerja anggaran dinas kelautan dan perikanan disajikan secara lebih lengkap dalam table T.C-24.

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	An gg ar an	Re al is as i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pro gra m Pel aya nan Adm ini str asi Per kan tor an	4,599,64 7,300	4,031,48 9,922	1,970,83 5,890	3,275,59 9,065	2,719,70 6,648	3,705,32 0,619	3,451,50 8,830	1,650,52 0,949	2,315,75 2,286	1,520,37 0,825	80. 56	85. 61	83. 75	70. 70	55.9 0		
Pro gra m Pen ing kat an Sar ana dan Pra sar ana Apa rat ur	2,321,39 2,000	1,240,56 4,960	801,664, 400	510,000, 000	209,029, 635	1,797,52 8,240	649,833, 895	595,593, 990	331,182, 929	120,947, 898	77. 43	52. 38	74. 29	64. 94	57.8 6		
Pro gra m Pen ing kat an Dis ipl in Apa	227,939, 100	-	-	-	-	224,800, 100	-	-	-	-	98. 62	#DI V/0 !	#DI V/0 !	#DI V/0 !	#DIV /0!		

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

rat ur																	
Pro gra m Pen ing kat an Pen gem ban gan Sis tim Pel apo ran Cap aian Kin erj a dan Keu ang an	59,715,200	78,068,600	52,750,000	931,649,685	863,402,800	42,607,950	40,441,400	37,069,800	803,840,262	34,130,000	71.35	51.80	70.27	86.28	3.95		
Pro gra m Pem ber day aan Eko nom i Mas yar aka t Pes isi r	2,819,739,978	2,388,698,760	1,698,780,750	300,000,000	-	2,457,603,900	2,243,915,300	1,466,245,050	125,307,500	-	87.16	93.94	86.31	41.77	#DIV/0!		

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pro gra m Pem ber day aan Mas yar aka t Dal am Pen gaw asa n dan Pen gen dal ian Sum ber Day a Kel aut an	2,617,73 3,500	1,161,63 5,600	1,890,74 5,050	364,302, 500	-	2,418,61 2,950	1,096,31 7,650	1,678,60 0,200	295,728, 480	-	92. 39	94. 38	88. 78	81. 18	#DIV /0!		
Pro gra m Pen ing kat an Kes ada ran dan Pen ega kan Huk um Dal am Pen day agu naa n Sum	634,884, 500	487,010, 000	300,000, 000	291,472, 600	-	297,313, 550	258,177, 050	252,318, 100	163,329, 600	-	46. 83	53. 01	84. 11	56. 04	#DIV /0!		

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

ber Day a Lau t																	
Pro gra m Pen gem ban gan Bud ida ya Per ika nan	9,853,02 9,200	12,723,5 21,902	1,679,79 4,000	4,196,00 0,000	1,729,00 0,000	8,528,82 8,388	11,194,2 76,435	3,465,90 2,440	3,719,68 9,600	1,441,23 7,250	86. 56	87. 98	206 .33	88. 65	83.3 6		
Pro gra m Pen gem ban gan Per ika nan Tan gka p	9,294,75 9,300	7,469,22 0,004	6,103,58 4,200	5,455,00 0,000	6,871,16 4,196	7,706,62 7,250	5,521,51 1,534	4,530,54 8,700	2,647,28 8,250	4,356,04 7,650	82. 91	73. 92	74. 23	48. 53	63.4 0		
Pro gra m Opt ima lis asi Pen gel ola an dan Pem asa ran Pro duk	636,320, 000	2,755,26 5,100	2,619,44 6,000	1,878,70 5,000	-	456,130, 450	2,509,34 5,000	2,439,78 0,591	680,855, 523	-	71. 68	91. 07	93. 14	36. 24	#DIV /0!		

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

si Per ika nan																	
Pro gra m Pen yia pan Pot ens i Sum ber day a, Sar ana dan Pra sar ana Dae rah	2,316,820,700		-	-	-	900,692,444		-	-	-	38.88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pro gra m Pen gem ban gan Kaw asa n Bud ida ya Lau t Air Pay au dan Air Taw ar	1,155,000,000		-	-	-	1,005,168,800		-	-	-	87.03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pro gra m Pen gem ban gan Dat a / Inf orm asi	1,585,12 0,100	687,411, 140	30,752,5 00	-	-	1,290,98 5,830	549,220, 875	292,474, 200	-	-	81. 44	79. 90	951 .06	#DIV /0!		
Pro gra m Pen gem ban gan Sar ana Pra sar ana Pen gol aha n dan Pem asa ran Has il Per ika nan .	3,095,06 1,300		-	-	-	2,617,72 3,700		-	-	-	84. 58	#DI V/0 !	#DI V/0 !	#DIV /0!		
Pro gra m Pen gem ban gan Sis tim Pen yul uha n Per ika	-	897,226, 400	131,265, 000	-	-	-	671,194, 800	105,470, 800	-	-	#DI V/0 !	74. 81	80. 35	#DIV /0!		

2 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

nan																	
Pro gra m Pen gem ban gan Ika n Spe sif ik Lok al	-	-	-	-	400,000, 000	-	-	-	-	318,982, 250		#DI V/0 !			79.7 5		
Pro gra m Pen iga tan Kes eja hte raa n Pet ani	-	-	-	-	200,000, 000	-	-	-	-	-					-		

Data-data yang ditunjukkan dalam table tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tahun 2013 - 2017, rasio antara realisasi dan anggaran tidak merata. Pada awal-awal periode yaitu dari tahun 2013-2015, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun pada periode selanjutnya yakni 2016-2017, rasio realisasi dan anggaran kurang begitu baik. Realisasi anggaran yang kurang baik sebagian besar diakibatkan oleh karena adanya keraguan terhadap mekanisme atau prosedur yang merupakan terjemahan dari peraturan yang berlaku. Salah satu diantaranya adalah mengenai mekanisme atau prosedur terkait dengan belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat. Perbedaan pandangan terhadap belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat, menimbulkan keraguan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan belanja barang tersebut, sementara untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, 80% Komponen belanja dari kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat. Kesimpang siuran terhadap mekanisme ataupun prosedur yang harus ditempuh terhadap belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat berakibat terhadap rasio antara realisasi dan anggaran dari masing-masing perangkat daerah yang memiliki belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat.

Data pada table juga mengindikasikan adanya Pertumbuhan anggaran yang bervariasi namun cenderung menurun pada akhir periode evaluasi renstra (2016-2017) sebagai akibat dari ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Dana Perimbangan (dana DBH) dari Pemerintah Pusat. Periode 2016 -2017, komoditi yang menjadi sumber penerimaan bagi Kab. Kutai Kartanegara seperti Migas dan Batu Bara mengalami penurunan harga, sehingga secara otomatis dana perimbangan (DBH) yang diterima Kab. Kutai Kartanegara juga menjadi berkurang. Persoalan tersebut berdampak terhadap pendanaan program dan kegiatan sehingga terdapat program dan kegiatan tidak mendapatkan alokasi anggaran pada periode tersebut.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Tantangan

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan akan dihadapkan pada beberapa persoalan yaitu:

1. Infrastruktur kelautan dan perikanan yang masih belum memadai.
2. Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan untuk kegiatan budidaya belum maksimal.
3. Unit penangkapan (jumlah armada dan alat penangkapan) wilayah laut masih berskala kecil/terbatas yang berukuran >5GT.
4. Hama dan penyakit ikan belum dapat dikendalikan secara optimal.
5. Produksi benih ikan yang diproduksi belum mampu memenuhi kebutuhan benih dalam daerah.
6. Belum maksimalnya ketersediaan induk ikan unggul.
7. Produksi kelautan dan perikanan belum memberikan nilai tambah secara optimal.
8. Diversifikasi produk olahan masih rendah/terbatas.

9. Peran masyarakat dalam konservasi sumberdaya ikan dan kegiatan *illegal fishing* belum optimal.
10. Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi.
11. Kerjasama antar SKPD/Instansi masih perlu ditingkatkan.
12. Adanya status Kawasan Budidaya Hutan (KBK) pada kawasan perikanan budidaya di Delta Mahakam.
13. Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan masih sangat terbatas.

b. Peluang

Dalam mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong secara optimal pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Minat budidaya ikan masyarakat tinggi.
2. Potensi sumberdaya ikan cukup berlimpah.
3. Terbukanya pasar antar kabupaten/kota, antar pulau dan ekspor.
4. Adanya UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No.45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
5. Pangsa pasar hasil kelautan dan perikanan yang besar.
6. Adanya kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta untuk keberlanjutan usaha.
7. Kerjasama antardaerah, nasional dan internasional.
8. Kebijakan nasional ekonomi maritim dan kelautan.

3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 akan dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta pelaku perikanan lainnya yang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel T-B.3.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	KINERJA BIROKRASI KELAUTAN DAN PERIKANAN KURANG MAKSIMAL	Kompetensi maupun Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berkembang	Akses terhadap pendidikan, pelatihan ataupun sosialisasi terbatas
		Sarana Aparatur Kurang Optimal	Peralatan kerja yang tersedia seperti PC, Printer, Scanner, infocus, Kursi dan meja kerja kurang ideal.
			Sarana yang tersedia sebagian besar sudah rusak
2	Produksi dan Produktifitas Kelautan dan Perikanan belum optimal	Sumber Daya Masyarakat Perikanan kurang ideal	Tingkat pendidikan masyarakat perikanan rata-rata lulusan sekolah dasar.
			Regenerasi terhadap profesi nelayan maupun pembudidaya ikan tidak berjalan, sehingga Tingkat Usia Masyarakat Perikanan yang produktif rata-rata diatas 40 Tahun
		Sarana Produksi (Pakan Ikan, Benih Ikan, Alat dan Kapal Tangkap Ikan) berbiaya tinggi	Pakan Ikan Masih sangat tergantung pada pakan pabrik
			Benih dan Indukan Unggul Berasal dari Luar Daerah
			Harga kapal penangkapan ikan semakin mahal karena sulitnya memperoleh bahan baku (Ketersediaan Kayu terbatas)
		Prasarana Produksi (BBI, Hatchery, TPI, Pabrik Es, SPBN) terbatas	Pola Usaha Menyebar
			Sulitnya mencari Lokasi Baru yang ideal untuk BBI
			Kapasitas Hatchery yang tersedia

		tidak mampu memenuhi kebutuhan benur masyarakat
		Belum tersedia pasar benih ikan untuk mengontrol suplay dan kualitas benih ikan di masyarakat
		Ketersediaan SPBN masih jauh dari ideal, sehingga nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar yang terjangkau
		Ketersediaan Listrik dan Air Bersih sebagai syarat utam pendirian pabrik es pada wilayah Pemukiman nelayan sangat terbatas
		Penyediaan TPI masih terkendala lahan serta Dokumen Perencanaannya
	Kapasitas usaha Masyarakat mayoritas berskala Kecil	Akses terhadap Perbankan terbatas
		Pengetahuan terhadap pola kemitraan rendah
	Kelembagaan (Kelompok yg terbentuk) Dominan Kelas Pemula	Kecenderungan membentuk kelompok karena kebutuhan pengajuan proposal bantuan.
		Kurangnya pembinaan karena keterbatasan tenaga penyuluh perikanan

Sumber : Tabel T-B.35.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kutai Kartanegara.

Visi dimaksud adalah "Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan", dengan Misi "Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Perekonomian Daerah".

Dominannya sector Pertambangan (Migas dan Batubara) dalam struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang sebagai sesuatu yang kurang baik oleh karena sector tersebut tidak dapat diperbaharui, serta juga merupakan komoditi yang tidak stabil karena mengikuti harga pasar dunia. Terpuruknya penerimaan Kab. Kutai Kartanegara sejak tahun 2016-2018 sebagai akibat dari anjloknya harga Minyak dan batubara dipasaran internasional. Tantangan besar ini dijawab dengan merubah arah kebijakan dengan mengedepankan sector pertanian sebagai pilar perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, terdapat beberapa Faktor penghambat dan factor pendorong yang teridentifikasi yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut. Faktor-faktor penghambat dimaksud adalah :

3 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

- Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparat Dinas Kelautan dan Perikanan kurang optimal yang berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Kapasitas SDM Nelayan dan Pembudidaya Ikan masih rendah. Dengan tingkat pendidikan masyarakat perikanan rata-rata lulusan sekolah dasar dan regenerasi terhadap profesi nelayan maupun pembudidaya ikan tidak berjalan (usia masyarakat perikanan yang produktif rata-rata diatas 40 Tahun), maka produktifitas akan sangat sulit ditingkatkan.
- Biaya Produksi yang tinggi. Keterbatasan Sarana Produksi (Pakan Ikan, Benih Ikan, Alat dan Kapal Tangkap Ikan) mengakibatkan biaya produksi sangat tinggi. Hal tersebut berdampak pada daya saing produk perikanan yang dihasilkan. Pakan Ikan Masih sangat tergantung pada pakan pabrik, Benih dan Indukan Unggul Berasal dari Luar Daerah, Harga kapal penangkapan ikan semakin mahal karena sulitnya memperoleh bahan baku (Ketersediaan Kayu terbatas), dan Pola Usaha Menyebar.
- Prasarana Produksi (BBI, Hatchery, TPI, Pabrik Es, SPBN) terbatas, karena Sulitnya mencari Lokasi Baru yang ideal untuk BBI, Kapasitas Hatchery yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan benur masyarakat, Belum tersedia pasar benih ikan untuk mengontrol suplay dan kualitas benih ikan di masyarakat, Ketersediaan SPBN masih jauh dari ideal, sehingga nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar yang terjangkau, Ketersediaan Listrik dan Air Bersih sebagai syarat utam pendirian pabrik es pada wilayah Pemukiman nelayan sangat terbatas dan Penyediaan TPI masih terkendala lahan serta Dokumen Perencanaannya.
- Kapasitas usaha Masyarakat mayoritas berskala Kecil dikarenakan, akses terhadap Perbankan terbatas dan pengetahuan terhadap pola kemitraan rendah.
- Kelembagaan (Kelompok yg terbentuk) Dominan Kelas Pemula dikarenakan, kecenderungan membentuk kelompok karena kebutuhan pengajuan proposal bantuan dan kurangnya pembinaan karena keterbatasan tenaga penyuluh perikanan.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong dimaksud adalah:

- Sumber daya Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan didominasi oleh tenaga dengan latar belakang pendidikan Sarjana Perikanan.

3 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

- Potensi Perairan sebagai area budidaya masih besar, sehingga ekstensifikasi usaha budidaya masih sangat mungkin untuk dilakukan.
- Harga jual relative lebih stabil.
- Stock ikan pada Daerah fishing ground di perairan laut masih besar.
- Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam mendukung usaha dibidang budidaya ikan dan usaha penangkapan ikan melalui kebijakan alokasi anggaran cukup tinggi.
- Keterlibatan pihak ketiga atau pihak swasta (perusahaan) yang cukup intens melalui program TJSP, yang dibuktikan dengan terbentuknya forum TJSP dimana forum tersebut bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait merumuskan program kegiatan secara bersama-sama.
- Peluang pasar yang cukup tinggi, sehingga merangsang masyarakat untuk berupaya dibidang perikanan.

3.3. Telaahan Renstra KKP dan RENSTRA DKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

a. Telaahan Renstra KKP.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri KP No. 25 tahun 2015. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah **"Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional"**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat

diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

b. Telahaan Renstra DKP Propinsi Kalimantan Timur.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2014-2018 adalah:

"Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur yang Sejahtera melalui Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur, pembudidaya ikan, nelayan, dunia usaha dan mendorong penciptaan kesempatan kerja.
2. Melaksanakan revitalisasi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
3. Menumbuhkembangkan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, pembudidaya ikan dan nelayan serta pemanfaatan perikanan non konsumsi.
4. Mengembangkan teknologi perikanan dan keanekaragaman produk sebagai upaya penciptaan daya saing dan nilai tambah perikanan.
5. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya ikan yang memberikan hasil optimal dan berwawasan lingkungan.
6. Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melestarikan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Untuk mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur, pembudidaya ikan, nelayan, dunia usaha dan mendorong penciptaan kesempatan kerja.
2. Menumbuhkembangkan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan dan pelaku usaha perikanan non konsumsi.
3. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dengan memperhatikan wilayah-wilayah konservasi sumberdaya ikan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Penerapan teknologi sebagai upaya penciptaan daya saing produk dan pemasaran produk hasil perikanan.
5. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan untuk pemerataan konsumsi dan pendapatan masyarakat perikanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang dan wilayah dalam pembangunan jangka panjang (20 tahun) merupakan faktor penting untuk terwujudnya keserasian, kelestarian, dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membagi wilayah pengembangan dalam 3 wilayah pembangunan terpadu (WPT) sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan Terpadu I (Wilayah Pantai/ Pesisir)
Meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu : Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak dan Marangkayu dengan pusat pelayanan di Kecamatan Muara Badak.
2. Wilayah Pengembangan Terpadu II (Wilayah Tengah)
Meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu : Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu, dan Loa Janan dengan pusat layanan di Tenggarong.
3. Wilayah Pengembangan Terpadu III (Wilayah Hulu)
Meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu : Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun dengan pusat layanan di Kota Bangun

Dinas Kelautan dan Perikanan menyikapi hal tersebut dengan mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan pembagian zonasi tersebut, khususnya dalam pengembangan budidaya perikanan berdasarkan jenis komoditi ditunjukkan pada Tabel 3.1. berikut ini

Tabel.3.1. Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Komoditas

WPT 1	WPT 2	WPT 3
Udang Windu	Ikan Mas	Ikan Patin
Bandeng	Ikan Nila	Ikan Betutu
Kepiting	Ikan Lele	Ikan Belida

Untuk kegiatan penangkapan ikan, WPT 1 merupakan wilayah pengembangan perikanan tangkap perairan laut dan WPT 2 dan 3 merupakan wilayah pengembangan perikanan tangkap perairan umum.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT/*strength-weakness-opportunities-threats*).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni: *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan *International Plan of Action, Millennium Development Goals* Kelautan dan Perikanan, *Sustainable Development Goals* Kelautan dan Perikanan, *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994, serta *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai fakta Internasional dan Regional, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sedangkan lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni (1) aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, (2) aspek sosial dan politik, yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Inpres, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota, (5) perkembangan Iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan, (6) kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan

pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra pengolahan berbasis produk perikanan, dan (7) sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

AnalisisLingkungan Internal

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi:

Kekuatan:

- 1) Sumberdaya manusia kelautan dan perikanan relatif banyak.
Sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang relatif cukup tersedia di wilayah ini merupakan modal utama pembangunan kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, pedagang perantara (*middlemen*) dan pedagang pengecer untuk memasarkan hasil kelautan dan perikanan
- 2) Usaha perikanan menjadi penghidupan utama masyarakatkelautan dan perikanan.
Usaha perikanan tangkap tradisional dengan menggunakan berbagai alat tangkap, kegiatan pertambakan udang dan ikan dengan teknologi sederhana/tradisional berciri ekstensif, pengolahan hasil perikanan misalnya produk amplang, kerupuk udang/ikan, hasil olahan rumput laut merupakan sumber penghidupan utama (*major livelihoods*) masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Adanya kebijakan kelautan dan perikanan daerah yang mendukung.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen kuat dan kebijakan dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan diantaranya memfasilitasi penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan pencadangan kawasan konservasi perairan umum dan pesisir serta meningkatkan program pemberdayaan terhadap pembudidaya dan nelayan skala kecil.
- 4) Posisi strategis dan keunikan sumberdaya perikanan.
Wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi yang strategis yakni pada kawasan Delta Mahakam yang merupakan kawasan penting/strategis dalam aspek lingkungan pesisir dan wilayah ini

berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi kemaritiman. Sumberdaya perikanan darat di wilayah ini memiliki spesies mamalia Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*) yang merupakan jenis yang paling langka di dunia.

Kelemahan:

- 1) Penghidupan masyarakat kelautan dan perikanan yang masih rentan.
Penghidupan masyarakat kelautan dan perikanan menghadapi tekanan baik yang berasal dari faktor alam dan lingkungan (perubahan iklim global, abrasi/erosi sungai/pantai, musim penangkapan yang mengalami perubahan, situasi kemarau yang semakin panjang dan tidak menentu maupun yang berasal dari faktor ekonomi seperti meningkatnya harga-harga input produksi dan menurunnya produk penjualan serta hambatan kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat.
- 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan.
Masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu ditingkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasinya terutama pada masyarakat pendatang yang berada di kawasan Delta Mahakam.
- 3) Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan
Minimnya tenaga penyuluh lapangan menyebabkan kurang optimalnya pemahaman dan adopsi inovasi teknologi serta perubahan tingkah laku ke arah perbaikan di bidang kelautan dan perikanan. Disamping itu petugas yang menduduki jabatan struktural bukan berlatar belakang pendidikan teknis sehingga tingkat pengetahuan dan kemampuannya terbatas.
- 4) Terbatasnya sarana prasarana kelautan dan perikanan.
Penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang masih relatif terbatas karena keterbatasan anggaran menyebabkan keinginan masyarakat/pelaku usaha perikanan dan kelautan belum dapat terpenuhi semuanya.

Selain itu terdapat faktor-faktor strategis lainnya diantaranya: (1) Sumberdaya ikan, habitat, dan produksi; (2) Pengelolaan perikanan di daerah; (3) Kependudukan; (4) Ekonomi nasional; (5) Ideologi nasional; (6) Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum; (7) IPTEK dan akses informasi; (8) Ketersediaan bahan baku; (9) Manajemen industri (teknologi produksi, SDM, pemasaran); (10) Permintaan hasil perikanan dalam negeri

(termasuk UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan); (11) Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan; dan (12) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman adalah:

Peluang:

- 1) Pangsa pasar hasil kelautan dan perikanan yang besar
Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produk/hasil kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi (misal MEA dan APEC) semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung dengan munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar untuk menghasilkan produksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar baik ekspor maupun domestik.
- 2) Adanya kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta untuk keberlanjutan usaha.
Kelembagaan *public-private partnership* (PPP) bersama-sama pemerintah sebagai fasilitator dan regulator akan mempercepat keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- 3) Kerjasama antardaerah, nasional dan internasional.
Keterpaduan antar level pemerintahan baik lokal, regional, nasional dan global menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan terutama dengan diimplementasikan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membutuhkan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 4) Kebijakan nasional ekonomi maritim dan kelautan.
Salah satu tujuan pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional sesuai dengan ideologi Trisakti dan Nawacita Kabinet Kerja yang merupakan misi utama dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2015-2019 (Permen KP No. 25 tahun 2015).

Tantangan:

- 1) Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi.
Upaya peningkatan produksi perikanan dan kelautan saat ini terkendala oleh penurunan daya dukung lingkungan perairan, baik untuk usaha budidaya udang/ikan maupun penangkapan ikan. Hal ini selain disebabkan oleh gejala over eksploitasi juga dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan perairan akibat aktifitas industri dan rumah tangga di hulu maupun di wilayah pesisir.
- 2) Kerjasama antar SKPD/Instansi masih perlu ditingkatkan.
Kerjasama dalam implementasi program dan kegiatan dari SKPD terkait yang bersifat *cross-cutting issues* seperti ketahanan pangan, pembangunan kelautan dan pesisir, pengentasan kemiskinan dan mitigasi bencana pesisir dan akibat perubahan iklim global masih belum secara optimal dilaksanakan untuk mendorong pencapaian kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.
- 3) Adanya status kawasan hutan pada kawasan perikanan.
Wilayah Delta Mahakam seluas 110.00 hektar sebagian besar adalah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yakni dengan status Hutan Produksi (HP) berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013. Padahal dalam realitasnya kawasan tersebut sebagian besar (lebih 50%) telah dikonversi menjadi industri pertambakan tradisional. Adanya status kawasan hutan pada wilayah perikanan yang sangat potensial ini akan menghambat peningkatan produksi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan wilayah.
- 4) Penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan masih sangat terbatas.
Dengan masih terbatasnya kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan membuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan skala usaha bidang kelautan dan perikanan menjadi terbatas sehingga hasil yang diinginkan belum optimal.

Selain itu terdapat faktor-faktor strategis lainnya diantaranya: (1) Permintaan hasil perikanan nasional dan global; (2) Sumberdaya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan nasional, (3) Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan nasional, regional dan dunia; (4) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; (5) Kerjasama bilateral, regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (6) Praktek *Illegal fishing* nasional dan global; (7) Sumberdaya

3 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanan nasional dan dunia, pasok hasil perikanan dunia; dan (8) Kependudukan nasional.

Tabel 3.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFAS) Renstra Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				
1.	Sumberdaya manusia perikanan relatif banyak.	0,3	3	0,9
2.	Usaha perikanan menjadi penghidupan utama masyarakat	0,4	4	1,6
3.	Adanya kebijakan kelautan dan perikanan daerah yang mendukung	0,2	3	0,6
4.	Posisi strategis dan keunikan sumberdaya perikanan.	0,1	3	0,3
	Jumlah	1,00		3,4
Kelemahan				
1.	Penghidupan masyarakat yang masih rentan.	0,4	2	0,8
2.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat perikanan.	0,3	3	0,9
3.	Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan.	0,2	4	0,8
4.	Terbatasnya sarana prasarana kelautan dan perikanan.	0,1	4	0,4
	Jumlah	1,00		2,9

Sumber: Hasil analisis (2016)

Nilai matriks evaluasi internal : Total Kekuatan - Total Kelemahan =
3,4 - 2,9 = 0,5.

Tabel 3.3. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFAS) Renstra Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang				
1.	Pangsa pasar hasil kelautan dan perikanan yang besar	0,4	4	1,6
2.	Adanya kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta untuk keberlanjutan usaha.	0,2	3	0,6
3.	Kerjasama antardaerah, nasional dan internasional	0,1	3	0,3
4.	Kebijakan nasional ekonomi maritim dan kelautan	0,3	3	0,9
	Jumlah	1,00		3,4
Tantangan				
1.	Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi.	0,4	3	1,2
2.	Koordinasi antar SKPD/Instansi masih perlu ditingkatkan	0,2	3	0,6
3.	Adanya status kawasan hutan pada kawasan perikanan	0,3	3	0,9

3 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

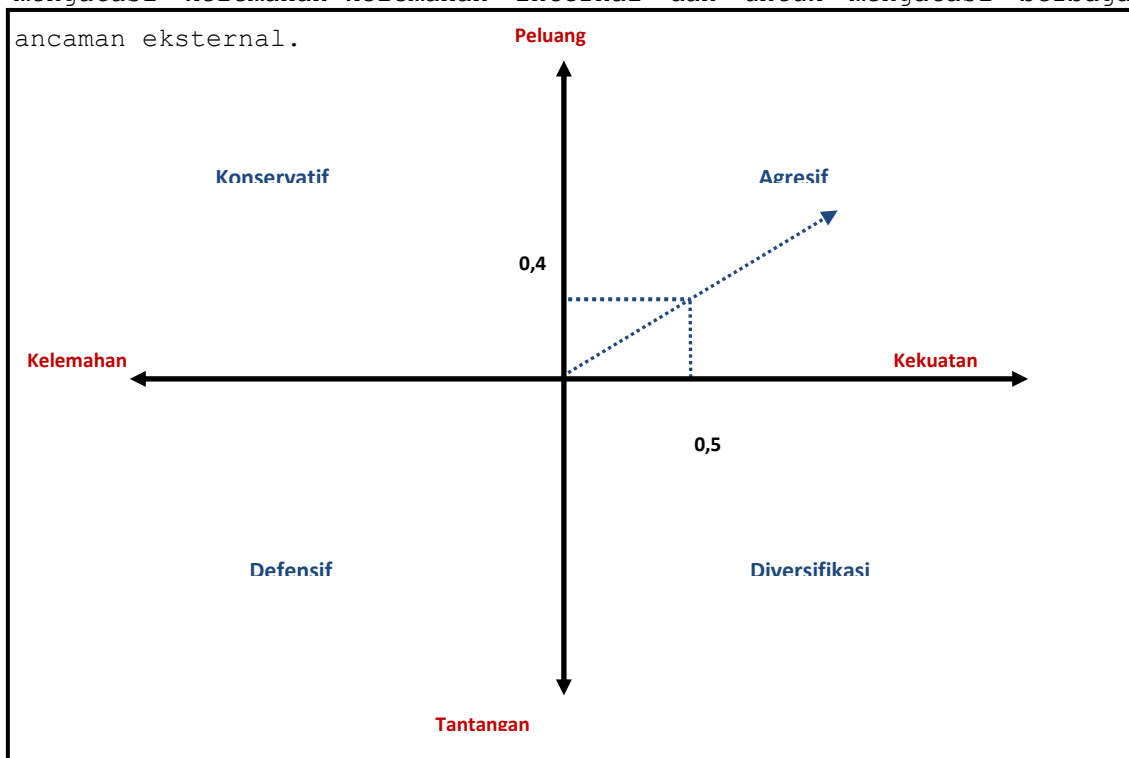
No.	FaktorStrategisEksternal	Bobot	Rating	Skor
4.	Inovasi iptek perikanan masih sangat terbatas	0,1	3	0,3
	Jumlah	1,00		3,0

Sumber: Hasil analisis (2016)

Nilai matriks evaluasi eksternal : Total Peluang - Total Ancaman = 3,4
- 3,0 = 0,4

Profil Strategi Peningkatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di dapat dari nilai evaluasi faktor internal dan eksternal. Nilai pada sumbu X (faktor internal) di dapat dari selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan dalam Matriks Evaluasi Faktor Internal (*IFE Matrix*, sedangkan nilai sumbu Y (factor eksternal) merupakan selisih dari nilai-nilai peluang dan ancaman pada Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (*EFE Matrix*. Profil strategi peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Gambar 3.1. di bawah ini.

Berdasarkan hasil analisis profil menunjukkan bahwa *stakeholders* di wilayah studi dalam melakukan peningkatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kukar berada di kuadran agresif, dimana *stakeholders* berada dalam posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya dalam rangka memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan-kelemahan internal dan untuk mengatasi berbagai ancaman eksternal.



3 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 3.1. Profil Strategi Peningkatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kuadran 1: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi.

Kuadran 3: Menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran 4: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Pengaturan dalam pengelompokan faktor-faktor internal dan eksternal di atas, selanjutnya dirumuskan strategi-strategi yang dikelompokkan menjadi:

1. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Kesempatan (S-O).
2. Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Kesempatan (W-O).
3. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman (S-T); dan
4. Strategi Mengurangi Kelemahan untuk Menghadapi Ancaman (W-T).

Strategi-strategi yang dirumuskan dalam analisis SWOT secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi S-O (Memaksimalkan kekuatan dan menangkap peluang):

- a. Pengembangan kapasitas dan ketahanan SDM dan kelembagaan untuk keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- b. Penguatan kemitraan dan kerjasama antar *stakeholders* dalam pembangunan perikanan kelautan dan kemaritiman.

2. Strategi S-T (Memaksimalkan kekuatan dengan menghindari ancaman):

- a. Penyusunan kebijakan dan regulasi daerah untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berorientasi kesejahteraan dan kemandirian.

3 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

- b. Peningkatan inovasi iptek kelautan dan perikanan untuk peningkatan daya saing.

3. Strategi W-O (Meminimalkan kelemahan dan menangkap peluang):

- a. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana dan petugas profesional kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan.

4. Strategi W-T (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari tantangan):

- a. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Tabel 3.4. Analisis SWOT untuk Penyusunan Renstra DKP Kabupaten Kukar Tahun 2016-2021

Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Eksternal	KEKUATAN/ <i>Strength</i> (S)	KELEMAHAN/ <i>Weakness</i> (W)
	1. Sumberdaya manusia perikanan relatif banyak 2. Usaha perikanan menjadi penghidupan utama masyarakat 3. Adanya kebijakan kelautan dan perikanan daerah yang mendukung 4. Posisi strategis dan keunikan sumberdaya perikanan	1. Penghidupan masyarakat yang masih rentan 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat perikanan 3. Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan 4. Terbatasnya sarana prasarana kelautan dan perikanan
PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S-O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG (W-O)
1. Pangsa pasar hasil kelautan dan perikanan yang besar 2. Adanya kemitraan masyarakat-pemerintah-swasta untuk keberlanjutan usaha. 3. Kerjasama antardaerah, nasional dan internasional 4. Kebijakan nasional ekonomi maritim dan kelautan	1. Pengembangan kapasitas dan ketahanan SDM dan kelembagaan untuk keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan 2. Penguatan kemitraan dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> dalam pembangunan perikanan kelautan dan kemaritiman	1. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan 2. Peningkatan sarana dan prasarana dan petugas profesional kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan

3 Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

TANTANGAN / <i>Threat</i> (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN (S-T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN (W-T)
1. Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi 2. Koordinasi antar SKPD/Instansi masih perlu ditingkatkan 3. Adanya status kawasan hutan pada kawasan perikanan 4. Inovasi iptek perikanan masih sangat terbatas	1. Penyusunan kebijakan dan regulasi daerah untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berorientasi kesejahteraan dan kemandirian 2. Peningkatan inovasi iptek kelautan dan perikanan untuk peningkatan daya saing	1. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang transparan dan akuntabel 2. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan

Sumber: Hasil analisis (2016)

42

- ☐ Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
- ☐ Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri;
- ☐ Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar perikanan
- meningkat Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - ☐ Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
 - ☐ Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;
 - ☐ Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparat pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang ditandai dengan :
 - ☐

Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat

□

Kelompok masyarakat pengawas perikanan meningkat

□

Berkurangnya tingkat pelanggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012. Melalui industrialisasi kelautan dan perikanan, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas dasar amanat Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Peraturan Menteri PU Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, telah dituangkan

43

dan ditetapkan melalui perda no 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang no 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri PU Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota,

Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Sehingga DIY berikut Kabupaten/Kota nya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis Jawa-Bali maupun kawasan strategis provinsi. Terkait kelautan dan perikanan maka DIY juga sudah mempunyai Perda DIY no 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030, Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian

44

terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi misi dan rencana strategis ditentukan isu strategis kelautan perikanan yang meliputi

3.5.1. Kebutuhan ikan DIY sebagian dipasok

dari luar, sementara produksi

DIY kadang tidak terserap di pasar, produk yang tersedia harus tetap memperhatikan mutu dan keamanan

pangannya, 3.5.2. Kuantitas dan kualitas SDM Kelautan dan Perikanan belum

optimal 3.5.3. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang meliputi

a. Rekayasa budaya nelayan dan akses peningkatan kemampuan teknis

dan permodalan untuk mendukung visi Among Tani ke Dagang Layar b. Pemanfaatan kapal 30 GTC. Prioritas pembangunan pelabuhan hingga operasional 3.5.4.

Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sekaligus optimalisasi pengawasannya 3.5.5. Produksi dan produktivitas perikanan

tangkap dan budidaya 3.5.6. Peningkatan usaha dan investasi di bidang kelautan perikanan

4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan pernyataan Tujuan Jangka Menengah di atas maka ditetapkanlah Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Perikanan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel.4.1. di bawah ini :

4 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					
1,1		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kelautan dan Perikanan	BB (78)	A (82)	A (87)	AA (91)	AA (93)
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas					
2,2		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Perikanan	2.1.1. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	102	103	103,5	104	104,5
			2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perikanan	4.387.557.866	4.500.000.000	4.600.000.000	4.750.000.000	4.900.000.000

Sumber: Tabel. T-C.25.

5

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel.5.1. dibawah ini.

Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan

Visi		:	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan			
Misi IV		:	Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Perekonomian daerah			
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1,1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	1.1.1	Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 Pelatihan Aparatur
						2 Pendidikan Aparatur
						3 Bimtek dan Sosialisasi
				1.1.2	Restrukturisasi Aset (Sarana Kerja Aparatur)	1 Penambahan Sarana Kerja Aparatur
						2 Pemeliharaan Sarana Kerja Aparatur
						3 Perbaikan Sarana Kerja Aparatur
						4 Penghapusan Aset
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	2,1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Perikanan	2.1.1	Peningkatan Kapasitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan	1 Pelatihan
						2 sosialisasi terhadap profesi dan masa depan nelayan dan pembudidaya ikan kepada generasi muda
				2.1.2	Menekan Biaya Produksi dengan Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktifitas Nelayan dan Pembudidaya ikan	1 Penyediaan Pakan Alternatif
						2 Peningkatan Kapasitas BBI dan Unit Pembenihan Rakyat
						3 Mendorong pemanfaatan Fiber sebagai

			bahan dasar pembuatan perahu
		4	Pengembangan berbasis kawasan
2.1.3	Penyediaan Prasarana Produksi	1	Meningkatkan Kwantitas dan kualitas UPR
		2	Mendorong bertumbuhnya Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)
		3	Mendirikan Pasar Benih Ikan Pada Sentra UPR
		4	Mendorong Pengusaha Lokal untuk mendirikan SPBN pada sentra Nelayan
		5	Mengupayakan ketersediaan akses jaringan Listrik dan Air Bersih pada sentra nelayan
		6	Mengidentifikasi dan menyediakan lahan untuk pembangunan tempat pelelangan ikan
2.1.4	Peningkatan Kapasitas Usaha.	1	Pembinaan dan Pendampingan usaha agar bankable
		2	Mendorong kegiatan-kegiatan Temu Kemitraan
2.1.5	Pembinaan Kelembagaan	1	Edukasi kepada kelompok masyarakat secara langsung
		2	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penyuluh

Sumber : Tabel T-C.26.

6

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
dan PENDANAAN INDIKATIF**

Indikator kinerja merupakan instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil, lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat melalui analisis dan evaluasi yang cermat, menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil serta mengacu pada indikator kinerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Hal tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di kabupaten ini.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode lima tahun mulai 2016 sampai dengan 2021 seperti yang tertuang dalam RPJMD, disajikan dengan 3 (tiga) aspek, meliputi:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.
2. Aspek Pelayanan Umum; menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
3. Aspek Daya Saing Daerah; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu instrumen dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut, lebih difokuskan dalam pencapaian pada aspek pelayanan umum.

6 | Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, indikator kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk ke dalam bidang urusan pemerintahan pilihan kelautan dan perikanan dan telah dirumuskan fokus/bidang urusan/indikator kinerja pembangunan daerah pada SKPD ini. Kondisi kinerja awal RPJMD bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2015 telah ditentukan dan selanjutnya telah diproyeksikan target kinerja dan pagu anggaran selama periode tahun 2016 sampai 2021. Dengan demikian proyeksi kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD di tahun 2021 secara agregat dapat ditentukan.

Selengkapnya mengenai penetapan indikator kinerja program dan sasaran menurut RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Tabel.6.1. di bawah ini.

Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.			Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah													Dinas Kelautan dan Perikanan .		
				Predikat Akuntabilitas Kinerja Kelautan dan Perikanan	BB (74,03)	BB (78)		A (82)		A (87)		AA (92)		AA (93)		AA (93)		Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Periode Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.520.370.825	12 Bulan	1.893.275.685	12 Bulan	2.545.000.000	12 Bulan	3.115.996.960	12 Bulan	2.690.996.960	12 Bulan	11.765.640.430		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Telepon Terbayarkan.	4 Jenis Rekening	4 Jenis Rekening	138.461.446	4 Jenis Rekening	280.000.000	4 Jenis Rekening	288.000.000	4 Jenis Rekening	200.000.000	4 Jenis Rekening	200.000.000	20 Jenis Rekening	1.106.461.446	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Loa Kulu, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu.
			Penyediaan Jasa Perpanjangan Ijin KIR dan STNK	Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK	3 Jasa KIR, 71 STNK	3 Jasa KIR, 71 STNK	17.936.200	3 Jasa KIR, 71 STNK	30.000.000	3 Jasa KIR, 71 STNK	30.000.000	3 Jasa KIR, 71 STNK	30.000.000	3 Jasa KIR, 71 STNK	30.000.000	15 Jasa KIR, 355 STNK	137.936.200	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Ketersediaan Administrasi Keuangan	34 Tenaga Administrasi Keuangan	35 Tenaga Administrasi Keuangan	292.696.000	35 Tenaga Administrasi Keuangan	265.660.250	35 Tenaga Administrasi Keuangan	438.361.250	35 Tenaga Administrasi Keuangan	600.000.000	35 Tenaga Administrasi Keuangan	600.000.000	175 Tenaga Administrasi Keuangan	2.196.717.500	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja Diperbaiki.	20 Unit	-	-	-	-	50 Unit	50.000.000	100 Unit	100.000.000	100 Unit	100.000.000	250 Unit	250.000.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket Jennis ATK	50 Jennis ATK	49.525.000	50 Jennis ATK	95.650.955	50 Jennis ATK	100.000.000	50 Jennis ATK	100.000.000	50 Jennis ATK	100.000.000	250 Jenis	445.175.955	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara Badak dan Marangkayu.
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	10 Jenis Cetakan	29.949.109	10 Jenis Cetakan	72.659.360	10 Jenis Cetakan	75.000.000	10 Jenis Cetakan	75.000.000	10 Jenis Cetakan	75.000.000	50 Jenis Cetakan	327.608.469	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara Badak dan Marangkayu.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Unit Komponen Instalasi Listrik (Baterai, Bola Lampu	100 Buah	0 Buah	-	235 Buah	10.000.000	235 Buah	10.000.000	235 Buah	10.000.000	235 Buah	10.000.000	940 Buah	40.000.000	Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Jawa,		

Bab 6 - 4 | H a l a m a n

Kantor	(Handle dan Kunci Pintu, Kunci Jendela dan Teralis Kantor Dinas dan UPT)										Kantor)	Kantor)			sanaan	Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara Badak dan Marangkayu.
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebeleur (Meja dan Kursi Kerja Pejabat dan Staf , Sofa BBI, UPT Tawar dan Ruang Sekretaris Dinas Perikanan)	-	-	-	-	-	30 Unit Kursi Lipat I, 16 Tempat Tidur, 8 unit Lemari Pakaian untuk BBI	150.000.000	121 Unit Meja dan Kursi Kerja	500.000.000	3 Unit Sofa	50.000.000	153 Unit	700.000.000	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara Badak dan Marangkayu.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Unit Rumah Jabatan Terpelihara	-	-	-	1 Unit	23.144.525	-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	3 Unit	123.144.525	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor Terpelihara (Pengecatan, dan Perbaikan Plafon Kantor Dinas dan UPT)	1 Unit	1 Unit	9.020.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	8 Unit	800.000.000	8 Unit	450.000.000	19 Unit	1.559.020.000	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara Badak dan Marangkayu.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor Berfungsi Baik. (Genset, Pompa Air BBI, AC, dan Bahan Bakar Genset dan Pompa Air)	26 Unit	-	-	35 Unit	100.000.000	22 Unit	50.000.000	35 Unit	100.000.000	35 Unit	100.000.000	127 Unit	350.000.000	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong dan Kec. Tenggarong Seberang.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Unit Mobil Jabatan Berfungsi Baik.	-	-	-	6 Unit	90.000.000	-	-	-	-	-	-	6 Unit	90.000.000	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional Berfungsi Baik.	74 Unit	66 Unit	111.927.898	38	100.000.000	44	180.000.000	44	180.000.000	44	180.000.000	236 Unit	751.927.898	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara Badak dan Marangkayu.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Terpelihara (Penutup Ventilasi Ruangan dan Kunci Pintu Ruangan).	-	-	-	1 Unit	25.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	25.000.000	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor Direhabilitasi. (Rehab Toilet Kantor Dinas Kabupaten, Rehab Ruangan dan Halaman Kantor UPT Loa Kulu, Rehab Ruang Kantor UPT Air Payau,	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit (Kantor Dinas Kab. dan UPT Tawar)	400.000.000	2 Unit (Kantor BBI Perjiwa dan Kantor UPT Payau)	300.000.000	4 Unit Gedung Kantor Dinas Kab., Kantor UPT Tawar, Kantor UPT Payau, Kantor BBI)	700.000.000	Subag Umum dan Ketatalak sanaan	Kec. Tenggarong, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Kulu.

		Rehab Teras Kantor BBI																	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Setiap Tahun.	90% 207 Orang)	-	-	-	-	-	-	98% (225 Aparatur)	500.000.000	100% (228 Aparatur)	500.000.000	100% (228 Aparatur)	1.000.000.000		Sekretari at Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Waskat)	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Waskat)	-	-	-	-	-	-	-	200 Stel	200.000.000	-	-	200 Stel	200.000.000		Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Staf UPTD)	Jumlah Stel Pakaian Kerja Lapangan (Staf UPTD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Stel	100.000.000	100 Stel	100.000.000		Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong	
	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri	-	-	-	-	-	-	-	200 Stel	100.000.000	-	-	200 Stel	100.000.000		Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.	Jumlah Stel Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Miskat, Batik dan Olah Raga)	-	-	-	-	-	-	-	200 Stel	200.000.000	400 Stel	400.000.000	600 Stel	600.000.000		Subag Umum dan Ketatalaksanaan	Kec. Tenggarong	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan mengisi Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.	80% (184 Aparatur)	-	-	-	-	-	90% (207 Aparatur)	600.000.000	92% (212 Aparatur)	600.000.000	95%(219 Aparatur)	600.000.000	95%(219 Aparatur)	1.800.000.000		Sekretari at Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan	Jumlah Aparatur mengikuti Pendidikan/Pe latihan	-	-	-	-	-	-	25 Aparatur	500.000.000	25 Aparatur	500.000.000	25 Aparatur	500.000.000	75 Aparatur	1.500.000.000		Sub Bagian Kepegawaian	Dalam dan Luar Daerah
	Fasilitasi Tim Bekias dan RB	Jumlah Tim Bekias dan RB	-	-	-	-	-	-	1 Tim (16 Anggota)	100.000.000	1 Tim (16 Anggota)	100.000.000	1 Tim (16 Anggota)	100.000.000	3 Tim (48 Anggota)	300.000.000		Sub Bagian Kepegawaian	Kec. Tenggarong, Kec. Loa Kulu
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Ketersediaan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11 Dokumen	6 Dokumen	34.130.000	10 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	775.000.000	12 Dokumen	775.000.000	12 Dokumen	775.000.000	52 Dokumen	2.459.130.000		Sekretari at Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan.	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	75.000.000		Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Kec. Tenggarong
	Penyusunan Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Tahunan, Dan Monev)	5 Dokumen	1 Dokumen	34.130.000	5 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	300.000.000	24 Dokumen	1.034.130.000		Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah	
	Penyusunan Data Dan Informasi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi (Data Statistik, Data Indeks Nilai Tukar, Data Konsumsi	5 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	-	5 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	400.000.000	23 Dokumen	1.200.000.000		Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Dalam Daerah Ka. Kukar

		Ikan, SIPD, PFID)															
	Pengelolaan Website	Jumlah Web Site	-	-	-	-	-	1 Web	50.000.000	1 Web	50.000.000	1 Web	50.000.000	3 Web	150.000.000	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Kec. Tenggarong
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas		Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas															
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan.	101,3	102	-	103	-	103,5	-	104	-	104,5	-	104,5	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP	Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	-	18 Kelompok	-	1 Kelompok	59.041.271	20 Kelompok	1.101.000.000	40 Kelompok	2.750.000.000	40 Kelompok	3.000.000.000	101 Kelompok	6.910.041.271	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	
	Pelatihan Nelayan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	-	-	-	-	-	159 Peserta	325.000.000	400 Peserta	400.000.000	400 Peserta	400.000.000	959 Peserta	1.125.000.000	Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil	Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis, Kec. Kenohan, Kec. Muara Kaman, Kec. Kota Bangun, Kec. Samboja, Kec. Muara Jawa, Kec. Anggana, Kec. Muara Badak dan Luar Daerah
	Pelatihan Budidaya Ikan	Jumlah Peserta Pelatihan	-	-	-	40 Peserta	59.041.271	500 Peserta	376.000.000	600 Peserta	800.000.000	650 Peserta	900.000.000	1.790 Peserta	2.135.041.271	Seksi Pendidikan dan Pelatihan Pembudidaya Ikan	BBI Perjiwa Tenggarong Seberang, Kec. Muara Jawa, Kec. Samboja, Kec. Muara Badak, Kec. Anggana, Kec. Loa Kulu, Kec. Kota Bangun dan Luar Daerah
	Temu Kemitraan Nelayan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	200 Peserta	100.000.000	400 Peserta	200.000.000	400 Peserta	200.000.000	1.000 Peserta	500.000.000	Seksi Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Nelayan Kecil	Kec. Tenggarong, Kec. Anggana, Kec. Samboa, Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Jawa
	Temu Kemitraan Pembudidaya Ikan	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	500 Peserta	100.000.000	450 Peserta	450.000.000	600 Peserta	600.000.000	1.550 Peserta	1.150.000.000	Seksi Kemitraan, Akses Informasi dan Iptek Pembudidaya Ikan	Kec. Tenggarong, Kec. Anggana, Kec. Samboa, Kec. Kota Bangun, Kec. Loa Kulu
	Pembinaan KUB	Jumlah KUB Terbina (Relembagaan, Usaha, SDM)	-	-	-	-	-	15 KUB	100.000.000	30 KUB	200.000.000	30 KUB	200.000.000	75 KUB	500.000.000	Seksi Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis, Kec. Kenohan, Kec. Kota Bangun, Kec. Muara Kaman, Kec. Samboja, Kec. Muara

	Pembinaan POKDAKAN	Jumlah POKDAKAN Terbina (Kelembagaan, Usaha, SDM)	-	-	-	-	-	50 POKDAKAN	100.000.000	100 POKDAKAN	600.000.000	100 POKDAKAN	600.000.000	250 POKDAKAN	1.300.000.000	Seksi Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Jawa, Kec. Anggana, Kec. Muara Badak dan Kec. Marangkayu
	Pembinaan POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS Terbina (Fasilitasi POKMASWAS)	-	-	-	-	-	-	-	12 POKMASWAS	100.000.000	12 POKMASWAS	100.000.000	24 POKMASWAS	200.000.000	Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan	Kec. Muara Muntai, Kec. Muara Wis, Kec. Kota Bangun, Kec. Muara Kaman, Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Loa Kulu, Kec. Loa Janan, Kec. Samboja, Kec. Muara Jawa, Kec. Anggana, Kec. Muara Badak
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perikanan.	-	4.387.557.866	-	4.500.000.000	-	4.600.000.000	-	4.750.000.000	-	4.900.000.000	-	4.900.000.000	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Bidang Perijinan, TPI dan Pengendalian Sumber Daya Ikan	
	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum	-	132 Unit	279.047.900	3.105 Pcs Material Alat Penangkapan Ikan	937.054.000	12.559 Pcs Material Alat Penangkapan Ikan	5.718.086.000	300 Unit	3.000.000.000	300 Unit	3.000.000.000	732 Unit dan 15.664 Pcs Material Pembuatan Alat Tangkap Ikan	12.934.187.900	Seksi Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu
	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan.	Jumlah Mesin dan Kapal Penangkapan Ikan	23 Unit Mesin Kapal Ikan	139 Unit (Kapal dan Mesin)	2.487.346.000	259 Unit (Kapal dan Mesin)	2.170.230.000	251 Unit	5.818.041.699	75 Unit	3.000.000.000	75 Unit	3.000.000.000	799 Unit (Mesin dan Kapal)	16.475.617.699	Seksi Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu
	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Jumlah Rumpon dan Cool Box	-	-	-	-	-	610 Unit Cool Box	700.000.000	50 Unit Rumpon	700.000.000	50 Unit Rumpon	700.000.000	100 Rumpon dan 610 Cool Box)	2.100.000.000	Seksi Penguatan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan TPI (DED)	Jumlah Dokumen DED TPI	2 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000	Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Kec. Samboja dan Kec. Anggana
	Penyediaan	Jumlah	-	-	-	2 Unit	199.000.	4 Unit	798.662.	2 Unit	200.000.	2 Unit	200.000.	10 Unit	1.397.662	Seksi	Kec. Samboja,

	Jembatan Tambat (Jetty)Kapa 1 Nelayan	Jembatan Tambat (Jetty)					000		685		000		000		.685	Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Anggana, Sanga-Sanga, Marangkayu, Muara Badak, Muara Jawa
	Pengembangan Station Bumi Muara Badak	Jumlah Station Bumi Terfasilitasi	1 Staion Bumi (Perbaikan Peralatan)	-	-	-	-	1 Station Bumi	100.000.000	1 Station Bumi	100.000.000	1 Station Bumi	100.000.000	3 Station Bumi	300.000.000	UPTD – Station Bumi Muara Badak	Desa Muara Badak Ilir – Kec. Muara Badak
	Evaluasi Pemanfaatan TPI Semangkok	Jumlah Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	65.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	65.000.000	UPTD – TPI Semangko	Desa Semangko', Kec. Marangkayu
	Penyusunan Potensi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan	Kec. Muara Kaman, Kota Bangun dan Muara Muntai
	Sosialisasi Pengendalian SDI	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	300 Peserta	100.000.000	450 Peserta	150.000.000	550 Peserta	200.000.000	1.300 Peserta	450.000.000	Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan	Kec. Muara Kaman, Kota Bangun dan Muara Muntai
	Operasional Pengawasan Reservat	Jumlah Reservat	-	-	-	-	-	3 Reservat	200.000.000	3 Reservat	200.000.000	3 Reservat	200.000.000	9 Reservat	600.000.000	UPTD – Reservat	Kec. Muara Muntai, Kota Bangun dan Muara Kaman
	Restocking Reservat	Jumlah Benih direstocking	-	-	-	-	-	63.680 Ekor	100.000.000	90.000 Ekor	150.000.000	125.000 Ekor	200.000.000	278.680 Ekor	450.000.000	Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan	Kec. Muara Muntai, Kota Bangun dan Muara Kaman
	DED PENDALAMAN ZONA INTI KAWASAN RESERVAT	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan	Kec. Muara Muntai dan Kota Bangun.
	PENDALAMAN ZONA INTI KAWASAN RESERVAT	Jumlah Reservat yg Zona Intinya diperdalam.	-	-	-	-	-	-	-	1 Reservat	500.000.000	1 Reservat	500.000.000	2 Reservat	1.000.000.000	Seksi Pengendalian Sumber Daya Ikan	Kec. Muara Muntai dan Kota Bangun
	Fasilitasi Ijin Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah Nelayan Terfasilitasi	-	-	-	-	-	200 Nelayan	200.000.000	500 Nelayan	500.000.000	500 Nelayan	500.000.000	1.200 Nelayan	1.200.000.000	Seksi Penerbitan SIUP dan TPKP	Kec. Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Muara Badak, Marangkayu
	Sosialisasi SIUP dan TPKP	Jumlah Peserta Soisalisasi	-	-	-	-	-	-	-	210 Peserta	250.000.000	210 Peserta	250.000.000	420 Peserta	500.000.000	Seksi Penerbitan SIUP dan TPKP	Wilayah Kab. Kukar
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang TPI dan Retribusi Jasa TPI	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	300 Peserta	150.000.000	300 Peserta	150.000.000	600 Peserta	300.000.000	Seksi Pengelolan dan Penyelenggaraan TPI	Kec. Kota Bangun, Marangkayu dan Kec. Samboja
	Fasilitasi Sertifikasi Lahan TPI Kec. Samboja	Jumlah Sertifikat Lahan	-	-	-	-	-	-	-	1 Sertifikat	50.000.000	-	-	1 Sertifikat	50.000.000	Seksi Pengelolan dan Penyelenggaraan TPI	Kelurahan Muara Sembilang, Kec. Samboja
	Pengadaaan Sarana dan Prasarana TPI.	Jumlah Sarana Prasarana TPI (TPI Kota Bangun dan TPI Samboja)	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket (TPI Kota Bangun)	750.000.000	1 Paket (TPI Samboja)	500.000.000	2 Paket (TPI Kota Bangun dan TPI Samboja)	1.250.000.000	Seksi Pengelolan dan Penyelenggaraan TPI	Kec. Kota Bangun dan Kec. Samboja
		Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya														Bidang Pengelolan Pembudidayaan Ikan	
	Rapat Koordinasi Stakeholder Utama dalam Pencoembangan	Frekuensi Rapat	-	-	-	-	-	-	-	4 Kali Rapat	100.000.000	4 Kali Rapat	100.000.000	8 Kali Rapat	200.000.000	Seksi Data, Informasi dan Penataan	Kec. Tenggarong dan Kec. Loa Kulu

n Kawasan Minapolitan	Operasional Balai Benih Ikan	Jumlah Sarana Prasarana BBI (Pakan, Benih, Induk, Obat-obatan dan peralatan pembenihan lainnya)	1 Paket	-	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	350.000.000	4 Paket	1.050.000.000	UPTD - Balai Benih Ikan	Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang
	Fasilitasi Sarana Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Jumlah UPR Terfasilitasi	1 UPR	-	-	3 UPR	450.000.000	5 UPR	450.000.000	15 UPR	1.500.000.000	20 UPR	2.000.000.000	43 UPR	4.400.000.000	Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan Ikan	Kec. Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Kota Bangun, Samboja, Anggana, Muara Badak
	Revitalisasi Tambak Rakyat	Luas Tambak direvitalisasi	-	-	-	-	-	3.500 M3	500.000.000	5.500 M3	750.000.000	5.500 M3	750.000.000	14.500 M3	2.000.000.000	-	Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu
	Surveilans dan Monitoring Kesling	Jumlah Dokumen Pelaporan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	Seksi Pengendalian Lingkungan dan Budidaya Ikan	Kec. Loa Kulu, Sebulu, Kota Bangun
	Monitoring Kesling	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000	Seksi Pengendalian Lingkungan dan Budidaya Ikan	Kec. Muara Muntai, Muara Kaman, Kenohan, Anggana, Samboja, Muara Badak
	Pemantauan Peredaran Obat Ikan	Jumlah Lokasi sentra Budidaya Ikan Terpantau	-	-	-	-	-	-	-	10 Lokasi	200.000.000	10 Lokasi	200.000.000	20 Lokasi	400.000.000	Seksi Pengendalian Lingkungan dan Budidaya Ikan	
	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan	Jumlah Benih Udang dan Ekor	8.000.000	105.000 Ekor	295.667.000	4.226.500 Ekor	1.013.641.814	3.920.000 Ekor	4.244.009.570	3.920.000 Ekor	4.300.000.000	3.920.000 Ekor	4.500.000.000	16.091.500 Ekor	14.353.318.384	Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan Ikan	Kec. Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Marangkayu
		Jumlah Benih Kepiting Soka	-	-	-	1.150 Kg	-	-	-	1.000 Kg	-	1.000 Kg	-	3.150 Kg	-		
		Jumlah Benih Rumpul Laut	-	-	-	4.500 Kg	-	-	-	5.000 Kg	-	5.000 Kg	-	14.500 Kg	-		
		Jumlah Pakan Ikan	17.780 Kg	3.450 Kg	-	8.380 Kg	-	77.930 Kg	-	50.000 Kg	-	50.000 Kg	-	189.760 Kg	-		
		Jumlah Keramba	4 Unit	36 Unit	-	28 Unit	-	18 Unit	-	50 Unit	-	50 Unit	-	182 Unit	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	Jumlah Kolam Terpal	7 Unit	-	-	16 Unit	-	47 Unit	-	25 Unit	-	25 Unit	-	113 Unit	-		
		Jumlah Dokumen (Pasar Benih Ikan, Lab. Hama dan Penyakit, Hatchery, dan Jaringan Tata Air Kolam)	-	-	-	-	-	2 Dokumen (Pasar Benih Ikan dan Lab. Hama dan Penyakit Loa Kulu)	250.000.000	1 Dokumen (DED Hatchery Muara Badak)	100.000.000	1 Dokumen (Jaringan Tata Air Kolam Budidaya Ikan)	100.000.000	4 Dokumen	450.000.000	Seksi Data, Informasi dan Penataan Ruang Pembudidayaan Ikan	Kecamatan Loa Kulu dan Kec. Muara Badak
	Penyusunan Dokumen Tata Ruang Budidaya Ikan.	Jumlah Dokumen Tata Ruang Ikan dalam Keramba-Kolam, dan Tambak.	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen (Dok. Tata Ruang Budidaya Keramba-Kolam)	400.000.000	1 Dokumen (Dok. Tata Ruang Budidaya Tambak)	400.000.000	2 Dokumen	800.000.000	Seksi Data, Informasi dan Penataan Ruang Pembudidayaan Ikan	Wilayah Kab. Kukar
	Uji Kualitas	Jumlah Uji sampel	-	-	-	-	-	10 Pengujia	50.000.000	12 Pengujia	100.000.000	12 Pengujia	50.000.000	34 Pengujia	200.000.000	Seksi Pengendalian	Kec. Sebulu, Kota Bangun,

	Air dan Pengambilan Sampel Produk Perikanan Budidaya							n	n	n	n					ian Lingkungan dan Budidaya Ikan	Muara Muntai, Loa Kulu, Samboja, Anggana
	Pengadaan Benih dan Induk Unggul Bagi BBI	Jumlah Benih dan Induk Unggul	-	-	-	-	-	... Ekor Benih dan ... Ekor Induk	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	00	UPTD - Balai Benih Ikan	Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang
	Pembentukan Sentra Kebun Bibit Rumput Laut	Jumlah sentra Kebun Bibit Rumput Laut	-	-	-	-	-	2 Kebun Bibit	100.000.000	2 Kebun Bibit	150.000.000	2 Kebun Bibit	150.000.000	6 Kebun Bibit	400.000.000	Seksi Data, Informasi dan Penataan Ruang Pembudidayaan Ikan	Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak dan Marangkayu
	Fasilitasi Sertifikasi CBIB dan CPIB	Jumlah Pembudidayaan Ikan dan UPR tersertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	200 Pembudidayaan	200.000.000	200 Pembudidayaan	200.000.000	400 Pembudidayaan	400.000.000	Seksi Pengendalian Lingkungan dan Budidaya Ikan	...
	Percontohan Budidaya Ikan Air Payau	Jumlah Percontohan	-	-	-	-	-	1 Percontohan	100.000.000	2 Percontohan	200.000.000	2 Percontohan	200.000.000	5 Percontohan	500.000.000	UPTD-Budidaya Air Payau	Kec. Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu
	Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah Percontohan	-	-	-	-	-	1 Percontohan	100.000.000	2 Percontohan	200.000.000	2 Percontohan	200.000.000	5 Percontohan	500.000.000	UPTD-Budidaya Air Tawar	Kec. Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Kota Bangun
	Demfarm Budidaya Sistik Bioflok	Jumlah Percontohan Bioflok	-	-	-	-	-	1 Percontohan	200.000.000	-	-	-	-	1 Percontohan	200.000.000	UPTD-Budidaya Air Tawar	Kec. Loa Kulu
	Penyediaan Supras (Benih, Pakan, Bak, dan peralatan budidaya ikan lainnya)	Jumlah Supras (Benih, Pakan, Bak, dan peralatan budidaya ikan lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	2 Paket	800.000.000	UPTD-Budidaya Air Tawar	Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Loa Janan
	Fasilitasi Ijin Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidayaan Ikan Terfasilitasi	-	-	-	-	-	150 Pembudidayaan Ikan	100.000.000	225 Pembudidayaan Ikan	150.000.000	300 Pembudidayaan Ikan	300.000.000	675 Pembudidayaan Ikan	550.000.000	Seksi Penerbitan SIUP dan TPKP	Kec. Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Samboja, Anggana, Muara Badak

7

KINERJA PENYELENGGARAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dilihat dari Tabel.7.1. dibawah ini.

Tabel.7.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kelautan dan Perikanan	BB (74,03)	BB (78)	A (82)	A (87)	AA (92)	AA (93)	AA (93)
2	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	101,3	102	103	103,5	104	104,5	104,5
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perikanan		4.387.557.866	4.500.000.000	4.600.000.000	4.750.000.000	4.900.000.000	4.900.000.000

Sumber: Tabel. T-C.28

8

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan di SKPD ini. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan dijalankannya Renstra ini secara konsisten diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* sektor kelautan dan perikanan di daerah. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan kelautan dan perikanan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *stakeholders* menyampaikan masukan (*feedback*) tentang prioritas kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempedomani Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan selama periode 2016-2021, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana kerja bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Untuk itu perlu bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi

aktif seluruh Pejabat dan Staf serta masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangat perlukan agar tindakan yang dilaksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Amin Yaa Robbal Alamin.